

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**KOORDINASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM  
PENANGGULANGAN ABRASI KELURAHAN  
TELUK BELITUNG KECAMATAN MERBAU  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**OLEH:**

**Esti Sagita Fauzi**

**NPM: 167310736**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau S-1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan usulan penelitian yang berjudul **Koordinasi Pemerintahan Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi Di Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan usulan penelitian ini dapat terselesaikan. Untuk itu rasa terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Safrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.

2. Bapak Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP M.Si, selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, motivasi, nasehat dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti beserta staf dan pegawai yang telah membantu dalam penyelesaian usulan penelitian ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
8. Ayahnda dan Ibunda tersayang atas curahan kasih sayang, untaian doa, serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.

9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016; terima kasih atas semuanya.  
Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan  
kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.

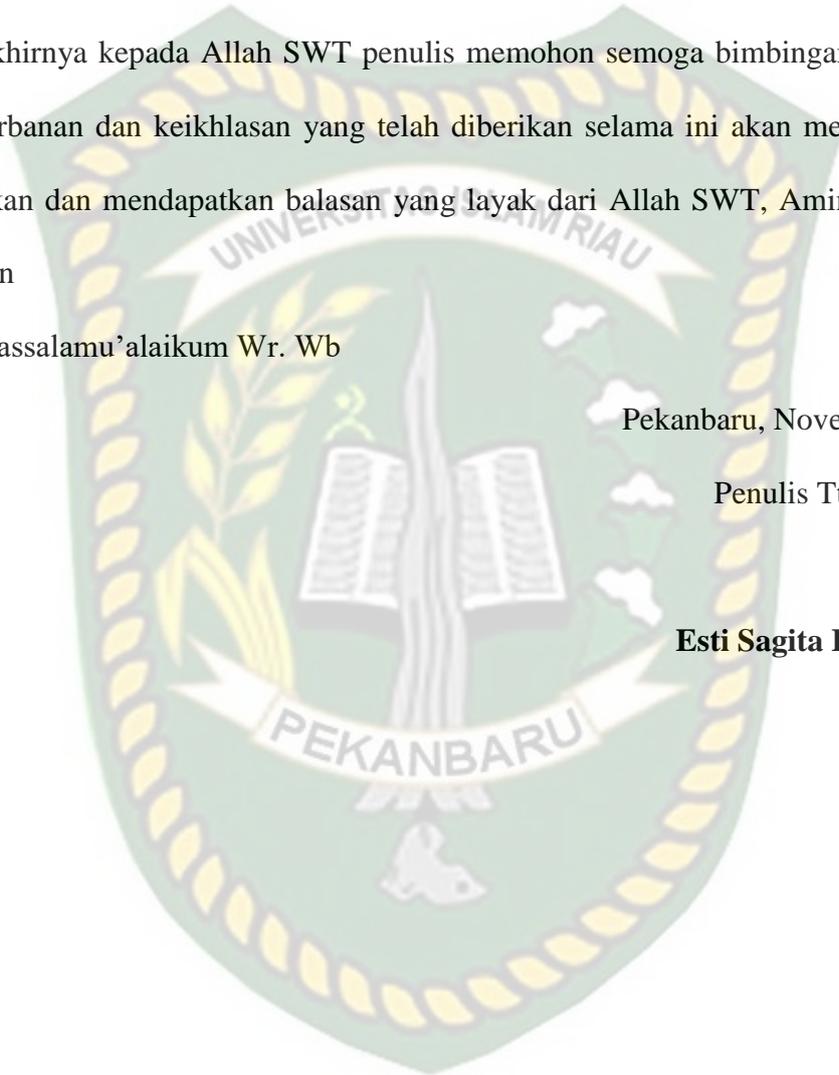
Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan,  
pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal  
kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal  
Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, November 2020

Penulis Ttd

**Esti Sagita Fauzi**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	14
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>15</b>
A. Studi Kepustakaan .....	15
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	15
2. Konsep Pemerintahan Daerah.....	22
3. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	23
4. Konsep koordinasi.....	27
5. Konsep Ekologi Pemerintahan.....	31
6. Konsep Abrasi.....	31
B. Penelitian Terdahulu .....	33
C. Kerangka Berfikir .....	36
D. Konsep Operasional Variabel .....	37
E. Operasional variabel .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>

3.1 Jenis Penelitian .....	39
3.2 Lokasi Penelitian.....	39
3.3 Informan Penelitian.....	40
3.4 Jenis Data dan Sumber Data .....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6 Analisis Data.....	45
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Merbau.....	48
4.2 Gambaran Umum Kelurahan Teluk Belitung .....	50
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
5.1 Hasil Penelitian tentang Koordinasi Pemerintahan Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti .....	65
5.2 Hambatan-hambatan Koordinasi Pemerintahan Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti .....	73
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
6.1 Kesimpulan .....	75
6.2 Saran-Saran .....	75
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Tugas-tugas di Dinas Pemerintahan Daerah .....	10
Tabel I.2. kerusakan abrasi di Kelurahan Teluk Belitung .....	13
Tabel III.3.1 Key Informan dan informan.....	40
Tabel IV.1 Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga di Kelurahan Teluk Belitung berdasarkan Jenis Kelamin.....	53
Tabel IV.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Etnis di Kelurahan Teluk Belitung .	55
Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kelurahan Teluk Belitung..	55
Tabel IV.4 Pergantian Pemerintahan Kelurahan Teluk Belitung.....	63
Tabel IV.5 Struktur Pemerintahan Kelurahan Teluk Belitung.....	64

**KOORDINASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM  
PENANGGULANGAN ABRASI KELURAHAN TELUK BELITUNG  
KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**ABSTRAK**

Oleh

**Esti Sagita Fauzi**

Koordinasi sangatlah penting dalam organisasi, karena didalam organisasi terdapat berbagai kegiatan yang ditangani oleh orang yang berbeda-beda, dalam penanggulangan abrasi tersebut sangat mementingkan koordinasi dan kerjasama antara dinas Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan agar terlaksananya pekerjaan penanggulangan abrasi di Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui koordinasi penanggulangan abrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan penanggulangan abrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah sesuai dengan aturan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu Koordinasi Pemerintahan Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti belum Terlaksanakan dengan baik. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Koordinasi Pemerintahan Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu kurangnya tanggung jawab dinas kabupaten yang menangani masalah penanggulangan abrasi tersebut dan tidak adanya anggaran dari daerah untuk penanggulangan abrasi.

**Kata Kunci : Koordinasi, Penanggulangan, Abrasi**

**COORDINATION OF LOCAL GOVERNMENTS IN ABRASION  
MANAGEMENT IN TELUK BELITUNG SUB-DISTRICT, MERBAU  
DISTRICT, MERANTI ISLAMIC REGENCY**

**ABSTRACT**

**By**

**Esti Sagita Fauzi**

*Coordination is very important in the organization, because in the organization there are various activities that are handled by different people, in the prevention of abrasion, it is very important to coordinate and cooperate between the district, sub-district and village offices so that abrasion prevention work can be carried out in Teluk Belitung Village, Merbau District, Islands Regency Meranti. The purpose of this study was to determine the coordination of abrasion prevention carried out by the local government and the abrasion control carried out by the regional government in accordance with existing regulations. The research method used is a qualitative method with data collection techniques through interviews and documentation. The results of the study are that the Coordination of Regional Government in Abrasion Management in Teluk Belitung Village, Merbau District, Meranti Islands Regency has not been implemented properly. The obstacles that occur in the Coordination of Local Government in Overcoming Abrasion in Teluk Belitung Village, Merbau District, Meranti Islands Regency are the lack of responsibility for the district office to handle the problem of overcoming abrasion and the absence of a budget from the region for abrasion.*

**Keywords: Coordination, Countermeasures, Abrasion**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sangat indah dan kaya akan sumber daya namun dibalik keindahan dan kekayaan negara Indonesia tersebut tersimpan suatu keadaan yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan status rawan bencana. Menurut Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan definisi bencana sebagai peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik factor alam dan/atau factor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Indonesia menjadi negara rawan bencana karena posisi geografis Indonesia di apit oleh dua samudera besar dunia (samudera Hindia dan samudera Pasifik) dan posisi geologis Indonesia pada pertemuan tiga lempeng utama dunia yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik yang sewaktu-waktu dapat menjadi bencana besar bagi Indonesia apabila lempeng-lempeng tersebut saling bertabrakan. Selain itu kondisi permukaan wilayah Indonesia (relief) sangatlah beragam sehingga membuat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) menyatakan dalam buku saku Indeks Resiko Bencana bahwa tidak ada satupun provinsi/kabupaten/kota di Indonesia yang bebas dari ancaman

bencana dan seluruh penduduk di Indonesia terpapar resiko bencana baik dalam tingkat sedang maupun tingkat tinggi.

Wilayah pesisir merupakan pertemuan antara wilayah laut dan wilayah darat, dimana daerah ini merupakan daerah interaksi antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang sangat dinamis dan saling mempengaruhi, wilayah ini sangat insentif dimanfaatkan untuk kegiatan manusia misalnya sebagai pusat pemerintahan, pemukiman, industry, pelabuhan, pertambakan, pertanian dan pariwisata.

Perairan wilayah Indonesia merupakan salah satu ekosistem yang sangat produktif diperairan laut. Ekosistem ini dikenal sebagai ekosistem yang dinamik dan unik, karena pada wilayah ini terjadi pertemuan tiga kekuatan yaitu yang berasal daratan, perairan laut dan udara. Dilihat dari garis geografis Indonesia sangat strategis karena merupakan pusat lalu lintas maritime antarbenua. Indonesia memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang besar, namun nyatanya belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional. Pemanfaatannya sumber daya yang belum optimal akan terjadi abrasi, erosi pantai ataupun degradasi akibat dari pemanfaatan yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah pantai/pesisir Indonesia hingga saat ini masih belum bisa ditanggulangi dengan baik dan optimal. Justru yang terjadi kerusakan lingkungan yang makin memperparah dan semakin luas. Penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah pesisir lebih didominasi oleh pencemaran-minyak, sampah dan gelombang laut, hal ini

menyebabkan beberapa pesisir pantai di Indonesia kerusakan mangrove dan terumbu karang.

Penyebab abrasi adalah permukaan air laut yang naik, dikarenakan mencairnya es di kutub. Sehingga berdampak pada pengikisan daerah permukaan lebih rendah. Abrasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah besar atau kecilnya gelombang laut dan cepat lambat gelombang laut. Sementara kekuatan abrasi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: besar kecil gelombang laut, tingkat kekerasan batuan (makin keras batu, kian tahan terhadap abrasi), dalamnya laut pada muka pantai (semakin dalam, kekuatan abrasi makin besar), banyaknya materi yang dibawa oleh gelombang (banyaknya materi yang sebagian besar berupa pasir atau kerikil akan menambah kekuatan abrasi jadi kian besar juga).

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada aparat Pemerintah Pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di daerah dan tugas pembantuan adalah perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah dan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara telah memberikan kesempatan dan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.

Tujuan pembentukan Negara ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah. Fungsi utama Pemerintah adalah melakukan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat, maka aparat yang menjalankan fungsi Pemerintahan itu adalah pengemban tugas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakatnya sebagai bagian dari wujud pelayanan kepada masyarakat itu agar masyarakat dapat terpuaskan.

Selanjutnya dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

Dengan adanya ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum untuk mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah sebagai satuan Pemerintahan Nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi ruang bagi daerah sebagai daerah otonom. Daerah otonom selanjutnya disebut otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Pemerintahan Daerah). Dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran

serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan maka Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum daya saing daerah. Sebagaimana yang termaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Daerah dalam rangka untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan menjalankan otonomi seluas-luasnya.

Adapun urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 yaitu:

1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya dalam pasal 10 ayat (1) menjelaskan Urusan Pemerintahan

Absolut meliputi:

1. Politik Luar Negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan Fiskal; dan
6. Agama

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:

1. Melaksanakan sendiri
2. Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Selanjutnya dalam pasal 11 menjelaskan Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Pangan
3. Pertanahan
4. Lingkungan Hidup
5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8. Perhubungan
9. Komunikasi dan Informatika
10. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
11. Penanaman modal
12. Kepemudaan dan olah raga
13. Statistik
14. Persandian
15. Kebudayaan
16. Perpustakaan
17. Kearsipan

Salah satu daerah yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang luas wilayah sekitar 3707.84 km<sup>2</sup>, di tempati oleh 9 kecamatan, 5 kelurahan dan 96 desa. Kabupaten Kepulauan Meranti ini termasuk salah satu Kabupaten termuda di Provinsi Riau di resmikan pada 16 januari 2009 yang ibukota nya Selatpanjang terletak di Tebing tinggi. Kabupaten ini juga terdapat beberapa pulau yang terdiri

dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, Pulau Dedap, Pulau Berembang, Pulau Burung.

Di Kepulauan Meranti terdapat beberapa Kecamatan yang mempunyai masalah terhadap lingkungan, salah satunya di kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau yaitu tentang terjadinya Abrasi atau pengikisan tanah pantai. Teluk belitung terletak pada Pulau Padang kota kabupaten kecamatan merbau, kepulauan Meranti dengan luas 1.348,91 km<sup>2</sup>. Kelurahan Teluk Belitung ini terletak di tepi pantai Selat Asam yang merupakan jalur pelayaran antar pulau-pulau di sekitarnya. Keberadaan Selat Asam yang berhubung langsung dengan Selat Melaka dan laut Cina Selatan menyebabkan arus di perairan Selat Asam ini terpengaruh oleh musim angin (muson). Menyebabkan gelombang di selat asam relatif cukup besar pada saat musim hujan.

Bentang alam Teluk Belitung sebagian besar terdiri dari daratan rendah. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah alluvial dan grey humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah yang mudah terurai dan berhutan bakau (mangrove) sebagai tanaman pelindung/pengikat yang sudah semakin berkurang. Dengan gelombang laut secara langsung mengenai garis pantai, ditambah lagi dengan kondisi tanah di Teluk Belitung dan sekitarnya merupakan tanah gambut yang relatif mudah terurai, sehingga menimbulkan masalah abrasi yang cukup serius di sepanjang garis pantai Teluk Belitung. Penanganan masalah abrasi pantai dan gelombang ekstrim dapat melibatkan berbagai kepentingan, nilai serta pemahaman penanganannya. Untuk itu diperlukan kerjasama seluruh pemangku

kepentingan dengan melibatkan pertimbangan biaya, operasional dan pemeliharaan. Selain kerjasama, pembagian kewenangan penanganan abrasi dan gelombang ekstrim di daerah pantai juga harus jelas, hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih pada masing-masing satuan kerja, serta perlunya koordinasi oleh masing-masing lembaga pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pengendalian abrasi.

Koordinasi sangatlah penting dalam organisasi, karena didalam organisasi terdapat berbagai kegiatan yang ditangani oleh orang yang berbeda-beda. Apabila terdapat suatu keadaan yang saling bergantung diantara kegiatan-kegiatan tersebut maka hasil yang efektif akan dapat tercapai.

Sementara itu koordinasi itu sendiri ialah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko, 2003: 195).

Berdasarkan Pusat Penelitian dan Analisis Abrasi Pantai Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau (2010), Kerusakan pantai akibat abrasi dapat dicegah dengan 3 cara: (1) secara alami, melalui penanaman bakau atau tanaman jenis lain; (2) bangunan penahanan gelombang atau turap; dan (3) merubah perilaku kehidupan masyarakat sekitar pantai. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja daerah di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam hal ini ada beberapa satuan kerja daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki kewenangan yang sama dalam penanggulangan kerusakan abrasi pantai baik bersifat pembinaan maupun teknis yaitu:

Tabel 1.1. Tugas-tugas di Dinas Pemerintahan Daerah

No	Dinas	Tugas
1	Badan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penegloloan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.</li> <li>- Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</li> <li>- Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan hidup</li> <li>- Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.</li> <li>- Pelaksanaan pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi</li> <li>- Mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.</li> <li>- DLL.</li> </ul>
2	Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum</li> <li>- Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum.</li> <li>- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum.</li> <li>- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
3	Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan Perikanan ,</li> <li>- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang Kelautan dan Perikanan.</li> <li>- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kelautan dan Perikanan.</li> <li>- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya</li> </ul>
4	Kehutanandan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas kehutan dan perkebunan melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang berdasarkan asas otonomi dan</li> </ul>

		tugas pembantuan di bidang Kehutanan dan Perkebunan
5	Camat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.</li> <li>- Mengkoordinasikan upaya ketentraman dan ketertiban umum.</li> <li>- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-Undangan.</li> <li>- Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.</li> <li>- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.</li> <li>- Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.</li> <li>- DLL.</li> </ul>
6	Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kelurahan.</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan.</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.</li> <li>- Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan ke-tata usahaaan.</li> </ul>

Sumber: Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2011

Fenomena ini jika terjadi dalam kurun waktu yang lama dan tanpa ada upaya penanggulangannya maka akan menyebabkan terjadinya perubahan garis pantai yang pada akhirnya akan membahayakan kelangsungan hidup masyarakat setempat, juga merugikan sumber daya alam yang tak ternilai harganya.

Tabel 1.2 kerusakan abrasi di Kelurahan Teluk Belitung

No	Tahun	Tingkat kerusakan abrasi
1	2017	500 m
2	2018	1 km
3	2019	2,5 km

(sumber data: Kelurahan Teluk Belitung).

Dari tabel diatas terdapat bahwa abrasi pantai yang terjadi di Teluk Belitung mulai dari tahun 2017- 2019 mengalami kenaikan pada tingkat kerusakan abrasi yang terjadi di Teluk Belitung. Bahkan dusun yang terdampak abrasi sebanyak 3 buah dusun, jumlah masyarakat yang terdampak abrasi sebanyak 78 KK dan jumlah estimasi kerugian akibat abrasi sebesar 212.455.250.

Darimasalah yang di paparkan diatas peneliti menemukan beberapa fenomena permasalahan:

1. Lemahnya komunikasi Pemerintahan Daerah terhadap penanggulangan abrasi.
2. Kurangnya koordinasi antara dinas-dinas Pemerintahan Daerah tentang penanggulangan abrasi di kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menilainya lebih lanjut dengan mengangkat Judul **“Koordinasi Pemerintahan Daerah dalam Penaggulangan Abrasi Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang di hadapi yaitu : Bagaimana Koordinasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan Penanggulangan Abrasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui koordinasi penanggulangan abrasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah
2. Untuk mengetahui apakah penanggulangan abrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sudah sesuai dengan aturan yang ada.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu pengetahuan
2. Secara praktis, menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan Koordinasi Pemerintahan Daerah dalam Penanggulangan Abrasi Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Secara akademik, dapat menjadi bahan referensi dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penelitian lainnya dimasa yang mendatang

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Syafie (2009;20) pemerintah berasal dari kata Pemerintah, kata Pemerintah tersebut memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, yaitu pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang di perintah memiliki ketaatan. Selanjutnya dalam buku yang sama menurut Syafie (2009;20) Pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (Eksekutif), sedangkan Pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (Legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (Yudikatif). Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa pemerintahan terdiri dari 3 lembaga yaitu : lembaga eksekutif , lembaga legislatif, lembaga yudikatif.

Menurut Ndraha (2006;6) Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat. Dimana seorang atau sebuah kelompok (disebut x) dalam proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok Lain (sebut saja y).

Menurut Awang (2012;6-8) Pemerintah (governance) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, disebut pemerintah. Maksudnya Pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi, dan hukum dalam sebuah Negara.

Menurut Ndraha (2011;7) Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Sedarmayanti (2004;9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Sedarmayanti, 2004;11).

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu member arti seluas-luasnya bagi kemasalahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Pemerintahan merupakan suatu fenomena yang awal dan perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dengan diperintah. Ungkapan yang sederhana ini ternyata didalam praktiknya merupakan suatu pemahaman yang rumit dan memiliki pengaruh yang begitu besar dalam tatanan kehidupan pemerintahan Negara pada dewasa ini.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari puasaran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000:418), istilah government (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu

politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 2005:7).

Bagian terakhir dari pembedaan terminologi pemerintahan oleh Finer menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurutnya (dalamnya Kuper, 2000:419) relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejumlah makna peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga Negara bagi upaya mencapai tujuan. Dalam fenomena yang lazim, sebagian pemerintah yang menganut paham demokrasi berupaya meminimalisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokratis biasanya menyadari dirinya sebagai “pelayan” bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemerintah totaliter lebih memaksimalkan upaya untuk sedapat mungkin menyentuh kebebasan individu dengan menyadari diri sebagai “majikan” bagi mereka yang diperintah. Sekalipun demikian, keduanya memiliki alasan yang dapat diterima, baik karena kondisi masyarakat maupun keinginan dari mereka yang sebagai pemerintah.

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan kepada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah public. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah public seperti kepentingan warga Negara, pemilik suara (voters) maupun para pekerja (workers). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas

politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000:417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu: akuntabilitas, legitimasi, dan transportasi. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (trust) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak Negara untuk menjalankan kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Muhadam Labolo:2006,20)

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga public dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan disebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000:13) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga Negara masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selanjutnya C.F Strong dalam Syafiie (2005:22) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undangan, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Ilmu pemerintahan adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, maupun pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-sehari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis, (Nurcholis, 2005:112).

Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan.

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan Negara perlu melakukan upaya-upaya, diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan Negara dapat terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintah

yang berarti peraturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat Negara diharapkan apa yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan Negara dapat dicapai.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten/kota merupakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara adil dan merata termasuk dalam bidang transportasi dan perhubungan ini, maka salah satu aktivitas yang dilakukan pemerintah melalui instansi teknis dinas adalah memvberi informasi yang kemudian dijadikan bahan dalam membuat kebijakan dalam bidang perhubungan dan mengawasi penerapan kebijakan yang telah dibuat.

## **2. Konsep Pemerintahan Daerah**

Pemerintahan Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administrative di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintaha Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut The Liang Gie, Pemerintahan Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

Setiap pemerintahan daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil Bupati dan untuk kota disebut wakil Wali Kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

### **3. Konsep Manajemen Pemerintahan**

Manajemen memiliki peran penting dalam menggerakkan segala sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sebagai alat pencapaian tujuan, organisasi itu tidak boleh tinggal diam atau statis, melainkan

harus bergerak melalui beberapa proses yang dinamakan manajemen, dengan kata lain bahwa manajemen itu merupakan penggerak tubuh organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan terlebih dahulu.

Menurut Siagian (2003;5) manajemen sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pncapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Sedangkan menurut George Terry (dalam Syafie 2013:126) berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang lainnya.

Kemudian Terry (2012;1) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

Menurut Kathry M. Bartol dan David C. Marten (dalam Kadarman, 2001;9) manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dan empat fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Perencanaan (Planning)
- b. Fungsi Pengorganisasian ( Organizing)
- c. Fungsi Penggerakan (Actuating)
- d. Fungsi Pengawasan Dan Pengendalian (Controlling)

Menurut Solihin (2009;4) manajemen dapat di definisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Definisi lain menurut Stoner (dalam Zulkifli, 2005;28) berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Menurut Supriyanto (2009:24) manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan “tatakelola” atau pengelolaan Pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Fungsi manajemen pemerintahan dapat dikategorikan antara lain:

1. Manajemen pemerintahan berarti membuat keputusan-keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau evaluasi tentang tata kelola pemerintahan, baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Manajemen pemerintahan berarti membuat kebijakan-kebijakan tentang hubungan yang mengikat antara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah.
3. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan penguasa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

4. Manajemen pemerintah berarti menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Manajemen pemerintah berarti melaksanakan kekuasaan pemerintahan, baik sebagai pemimpin Negara, pemerintahan, maupun lembaga-lembaga tinggi Negara.
6. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan pertanggung jawaban penggunaan anggaran secara berkala.
7. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) setiap akhir tahun anggaran .
8. Melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang ditugaskan.
9. Menentukan standar pelayanan yang wajib dilaksanakan dibidang tata kelola pemerintahan.
10. Menetapkan kinerja penentuan dan perubahan tata kelola pemerintahan.
11. Menyusun rencana nasional secara makro bidang tata kelola pemerintahan.
12. Menetapkan persyaratan jabatan bagi calon yang menempati jabatan dibidang pemerintahan.
13. Melakukan pembinaan dan pengawasan atau penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi kelembagaan, pemberian peodman/bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervise bidang tata kelola pemerintahan.
14. Pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama Negara bidang tata kelola pemerintahan.
15. Penetapan standar pemberian ijin untuk investor yang akan menanamkan modal.

16. Pengaturan sistem kelembagaan perekonomian Negara.
17. Penyelesaian perselisihan antar provinsi dibidang administrasi atau perbatasan daerah.
18. Penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan, pengendalian bidang tata kelola pemerintahan.
19. Penyelenggaraan hubungan kerja bidang tata kelola pemerintahan antar instansi.

Menurut Ndraha (2003;160) ruang lingkup manajemen pemerintahan terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen:

1. Perencanaan pemerintahan
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan
4. Kontrol pemerintahan

Dapat disimpulkan juga bahwa manajemen adalah ilmu dan seni yang digunakan seorang pemimpin untuk mempengaruhi para bawahannya, agar dapat menggerakkan sumber daya yang ada didalam sebuah organisasi, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan tujuan yang telah ditetapkan.

#### **4. Konsep Koordinasi**

Dengan pendelegasian wewenang dan pembagian pekerjaan para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai wewenang yang diterimanya. Setiap bawahan mengerjakan hanya sebagian dari pekerjaan perusahaan, karena itu masing-masing pekerjaan bawahan harus disatukan, diintegrasikan, dan diarahkan untuk tercapainya tujuan. Karena tanpa

koordinasi tugas dan pekerjaan setiap individu karyawan maka tujuan (laba) perusahaan tidak akan tercapai. Koordinasi ini merupakan tugas penting yang harus dilakukan oleh seseorang manajer dan tugas ini sangat sulit.

Menurut Fayol, Koontz dan O'Donnell (Sutarto, 2006:143) yang menjelaskan bahwa koordinasi yang baik hendaklah memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Komunikasi
- b. Kerjasama
- c. Pembagian tugas
- d. Penemuan rapat

Untuk jelasnya pengertian koordinasi ini, penulis mengutip definisi-definisi yang dikemukakan para ahli sebagai berikut:

### **1. Mc. Farland**

Koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama (Handyaningrat, 1985:89).

### **2. E.F.L Brech**

Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan 2007;85).

### **3. Handoko**

Koordinasi (coordination) sebagai proses penginterasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien (2003:195).

#### **1. Dr. Awaluddin Djamin, M.P.A.**

Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi (2015:86)

Tipe-tipe koordinasi

1. Koordinasi vertical (vertical coordination) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya.
2. Koordinasi horizontal (horizontal coordination) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat koordinasi horizontal ini dibagi atas interdisciplinary dan interrelated.

Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara interen maupun secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Interrelated adalah koordinasi antar badan (instansi), unit-unit yang fungsinya berbeda. Tetapi instansi yang satu dengan

yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik, cara intern maupun ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal ini relative sulit dilakukan, karena coordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

Sifat-sifat koordinasi (coordination characteristics):

1. Koordinasi adalah dinamis bukan statis.
2. Koordinasi menekankan padangan menyeluruh oleh seorang coordinator (manajer) dalam rangka mencapai sasaran.
3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Tujuan koordinasi:

1. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan.
2. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan.
3. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan.
4. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran.
5. Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan 6M ke arah sasaran organisasi atau perusahaan.
6. Untuk menghindari tindakan overlapping dari sasaran perusahaan.

Syarat-syarat koordinasi:

1. *Sense of cooperation* (perasaan untuk bekerja sama), ini harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang.

2. *Rivary*, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan.
3. *Team spirit*, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai.
4. *Esprit de corps*, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai umunya akan menambah kegiatan yang bersemangat.

## 5. Konsep Ekologi Pemerintahan

Menurut Edward S. Rogers: Ecology is of the study of relationship between organism and their environment.

Menurut Prajudi Atmosudirjo: Ekologi adalah tata hubungan total (menyeluruh) dan mutual (timbale-balik) antar satu organisme dengan lingkungannya.

Sedangkan Ekologi Pemerintahan ialah suatu ilmu yang mempelajari mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normative secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi Negara, maupun antar pemerintah, vertical horizontal, dan dengan masyarakatnya.

## 6. Konsep Abrasi

### 6.1. Pengertian Abrasi

Abrasi atau erosi adalah pengikisan. Abrasi merupakan proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat

merusak. Menurut Muh. Aris, Abrasi juga disebut erosi pantai. Erosi pantai merupakan hilangnya daratan di wilayah pesisir, penyebabnya adalah arus laut, gelombang, kondisi morfologi, keberadaan vegetasi pantai dan adanya aktivitas manusia yang bersifat merusak pantai. Menurut Bambang Triatmodjo, erosi pantai yang merusak kawasan pemukiman dan pasaran kota yang berupa mundurnya garis pantai. Erosi pantai bisa terjadi secara alami oleh serangan gelombang atau karena adanya kegiatan manusia seperti penebangan hutan mangrove, pengambilan karang pantai, pembangunan pelabuhan atau bangunan pantai lainnya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disampaikan bahwa abrasi merupakan pengikisan garis pantai yang bersifat merusak. Abrasi dapat disebabkan oleh factor alam maupun campur tangan manusia. Factor alam berupa hantaman gelombang, sedangkan factor manusia disebabkan oleh aktivitas manusia yang merusak seperti pengalihan lahan mangrove, pengerukan pasir pantai, dan lain sebagainya.

### **6.2. Tingkat Kerusakan Abrasi**

Terjadinya perubahan garis pantai dapat disebabkan oleh gangguan terhadap angkutan sedimen menyusur pantai, pasokan sedimen yang berkurang, adanya gangguan bangunan, dan kondisi tebing yang lemah sehingga tidak tahan terhadap hempasan gelombang. Perubahan terhadap garis pantai ini berdampak pada mundurnya garis pantai dan terancamnya fasilitas yang ada di kawasan pantai.

### **6.3. Factor Penyebab Abrasi**

Terjadinya abrasi dipengaruhi oleh beberapa factor. Menurut Ongkosongo dalam Gentur Handoyo factor-faktor penyebab perubahan garis pantai ada dua macam yaitu factor alami dan factor manusia. Factor alami antara lain gelombang arus, angin, sedimentasi, pasang surut, dan lain-lain. Sedangkan factor manusia meliputi penggalian, penimbunan, reklamasi pantai, dan lain-lain.

Proses terjadinya abrasi karena factor alam disebabkan ketika angin yang bergerak di laut menimbulkan gelombang dan arus menuju pantai, arus dan angin tersebut memiliki kekuatan yang lama kelamaan menggerus pinggir pantai. Gelombang di sepanjang pantai menggetarkan atau batuan yang lama kelamaan akan terlepas dari daratan. Kekuatan gelombang terbesar terjadi pada waktu terjadi badai, sehingga dapat mempercepat proses abrasi itu sendiri.

### **B. Penelitian Terdahulu**

Berikut ini akan dipaparkan beberapa penelitian terlebih dahulu yang bertujuan untuk mendukung teori yang dibangun maupun untuk menjelaskan akibat dan keorisinilitas-an penelitian ini:

No	Nama Penelitian	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Randi Yuhadi, 2017	Koordinasi Pemerintah Kota Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru	Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Penelitian sebelumnya menggambarkan tentang Koordinasi Pemerintah Kota Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian yang saya lakukan untuk mengetahui

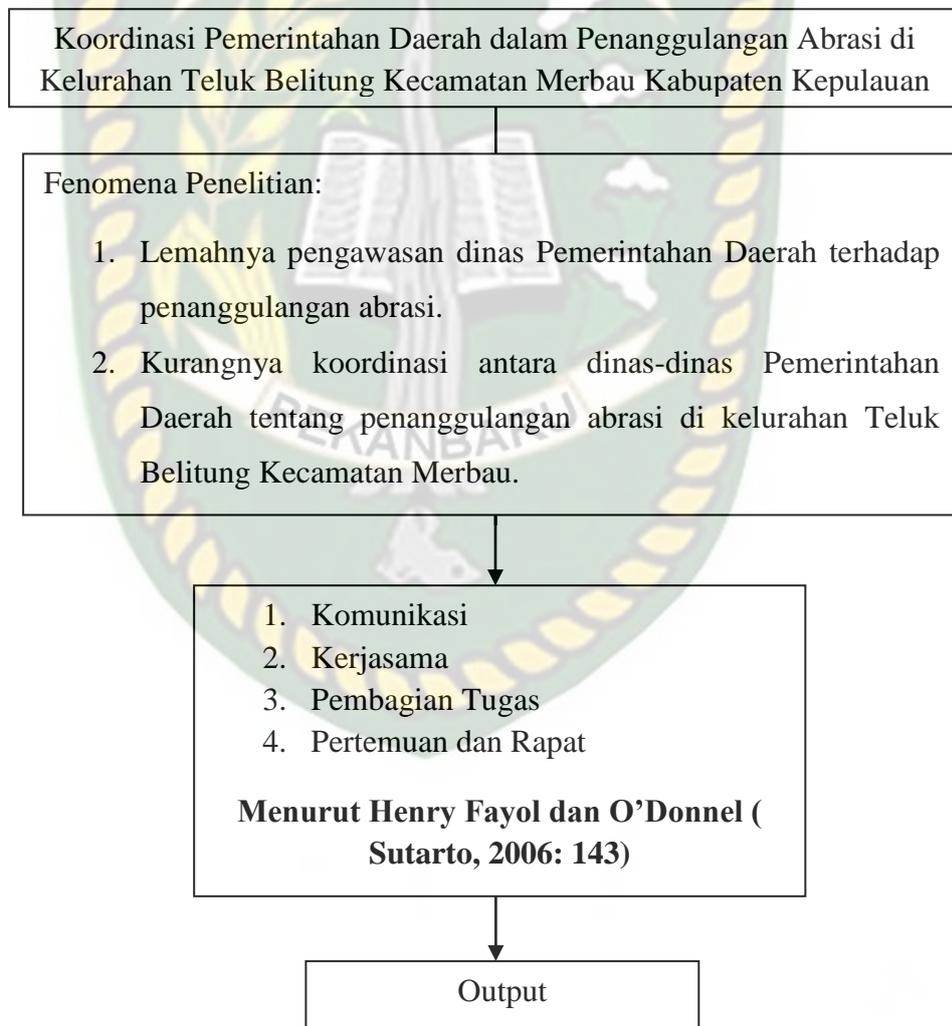
				bagaimana Koordinasi Pemerintahan Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti
2	Iin Nurbaity, 2018	Koordinasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanggulangan Banjir Rob di Desa Alahair Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2011-2015	Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Penelitian sebelumnya menggambarkan Koordinasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanggulangan Banjir Rob di Desa Alahair Kecamatan Tebing-Tinggi Tahun 2011-2015. Sedangkan penelitian yang saya lakukan untuk mengetahui bagaimana Koordinasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanggulangan Abrasi di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti
3	Shahira Harum, 2016	Koordinasi Antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) DI Rokan Hilir Tahun 2010-2013	Menggunakan metode penelitian kualitatif yang penyajiannya deskriptif	Penelitian sebelumnya menggambarkan Koordinasi Antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) di Rokan Hilir 2010-2013. Sedangkan penelitian yang saya lakukan untuk mengetahui Koordinasi Pemerintahan Daerah

				Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanggulangan Abrasi di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti
4	Mhd.Mulyawan, 2016	Koordinasi Penertiban Pelabuhan Illegal di Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti	Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Penelitian sebelumnya menggambarkan Koordinasi Penertiban Pelabuhan Illegal di Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan penelitian yang saya lakukan untuk mengetahui bagaimana Koordinasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanggulangan Abrasi di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti
5	Hara Eka Triguna, 2015	Koordinasi Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Kota Pekanbaru	Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Penelitian sebelumnya menggambarkan Koordinasi Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas di Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian yang saya lakukan untuk mengetahui Koordinasi Pemerintahan Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

Sumber : Olahan Penelitian 2020

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir atau kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan di sebuah topic penelitian. Yang menjadi criteria utama dalam membuat suatu kerangka berpikir agar dapat meyakinkan ilmuwan adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membuat suatu kerangka berpikir dapat membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis.



## 5. Konsep Operasional Variabel

Agar penelitian ini dapat terarah secara profesional dengan adanya kesatuan dan keseragaman persepsi terhadap konsep-konsep yang digunakan, serta untuk menghilangkan dan menghindari kesalah pahaman beberapa konsep ataupun yang akan diperlukan di dalam penelitian. Maka perlu dijelaskan terlebih dahulu konsep yang akan dioperasionalkan, adapun konsep yang akan digunakan yaitu:

- a. Koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama
- b. Komunikasi, jika dilihat dari komunikasi maka dapat dikatakan belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari kondisi lokasi yang masih belum di perbaiki sepenuhnya.
- c. Kerjasama, dalam menjalankan kerjasama kita dituntut untuk mengetahui tugas masing-masing yang sudah ditentukan.
- d. Pembagian Tugas, adalah pengkhususan yang dipertimbangkan agar terdapat efisien dan menggunakan tenaga kerja antara instansi terkait dengan demikian akan diketahui siapa yang melaksanakan dan yang dilaksanakan.
- e. Pertemuan rapat, pertemuan rapat yang diadakan untuk membahas tentang penanggulangan abrasi masih jarang dilakukan oleh dinas dinas yang terkait sehingga banyak yang kurang mengetahui tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi.

## 6. Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item ukuran
Koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan bersama, Mc. Farland (Handyaningrat, 1985:89)	Koordinasi pemerintahan daerah dalam penanggulangan abrasi kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti	1.Komunikasi  2.kerjasama  3.Pembagian Tugas  4.Pertemuan Rapat	a.adanya komunikasi antara dinas satu dan dinas lainnya b.komunikasi yang terjadi masih kurang baik  a.bekerjasama dengan dinas dinas yang bersangkutan b.menyelesaikan permasalahan a.menjalankan tugas yang sudah dibagi b.menggunakan tenaga kerja antara instansi terkait a.membahas tentang masalah yang ada b.pertemuan antara dinas-dinas yang terkait.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang ditemukan dibanyak bidang, khususnya evaluasi, dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, sering kali program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu individu atau lebih (Creswell, 2016:19). Studi kasus pada penelitian ini yaitu: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Penanggulangan Abrasi di Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau. Alasan penelitian menggunakan pendekatan studi kasus ini karena mendalami fenomena yang terjadi yaitu tentang abrasi yang semakin mengikis daerah pesisiran di Teluk Belitung sehingga jalan di pinggir pantai tersebut hancur.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini karena pengikisan abrasi yang terjadi semakin meningkat setiap tahunnya, peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan peneliti tertarik untuk membahas masalah ini lebih lanjut.

### 3.3 Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang menjadi narasumber dalam penelitian untuk memberikan keterangan dan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang telah dibutuhkan dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang valid, peneliti memilih informan yang dapat memberikan informasi berupa data yang berhubungan dengan judul koordinasi pemerintahan daerah dalam penanggulangan abrasi kelurahan teluk belitung kecamatan merbau kabupaten kepulauan meranti. Adapun informan penelitian atau orang yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling. Teknik ini merupakan teknik yang menentukan informan dengan didasari pada sejauh mana sedalam apa informasi yang dimiliki berkaitan dengan koordinasi pemerintahan daerah dalam penanggulangan abrasi di kelurahan teluk belitung kecamatan merbau kabupaten kepulauan meranti, apakah informasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan dapat didefinisikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang menjadi sumber informasi untuk mendapatkan data melalui keterangan dan pemaparan.

Data yang diambil dari informan merupakan data-data yang relevan dengan penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan key person. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 3.3.1 Key Informan dan Informan**

NO	NAMA	JABATAN	USIA	KETERANGAN
1	Izhar. Z	Karyawan Honorer	52 tahun	Key informan

2	Tengku Nurbaiti, S.Pd	Staff Umum	35 tahun	Informan
3	HJ. Wan Jumiati, SE	Sekretaris Lurah	48 tahun	Informan
4	Usman	RT	55 tahun	Informan

Sumber Data: Kantor Kelurahan Teluk Belitung

#### 1.4 Jenis Data dan Sumber Data

Setelah data-data yang diperlukan di dalam penelitian diperoleh, maka hasil data-data tersebut dikelompokkan, diklasifikasikan dengan dianalisa sesuai dengan jenis-jenis data yang diperlukan. Adapun jenis-jenis data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder yaitu sebagai berikut:

##### 1.4.1 Data Primer

Menurut Siyato & Sodik (2015:67) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Penelitian lapangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi maupun data seakurat dan seobyektif mungkin, sehingga dapat menggambarkan kondisi sesuai fakta yang ada di lapangan, baik melalui observasi maupun wawancara berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara secara langsung yaitu berupa daftar wawancara dengan informan yang berkaitan dengan koordinasi pemerintahan daerah dalam penanggulangan abrasi di kelurahan teluk belitung kecamatan merbau kepulauan meranti yaitu kepala dinas lingkungan hidup, kepala dinas kehutanan dan masyarakat.

##### 1.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, posisi peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian dan dapat menjadi penunjang dalam penelitian (Siyoto, 2015).

### 1.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Menurut Moleong (2010) Ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data, yaitu:

- a. Observasi (pengamatan), didefinisikan oleh (Idrus, 2009) sebagai sebuah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari responden yang dijadikan sampel penelitian. Dalam bukunya, (Creswell, 2010) mengatakan bahwa peneliti mencatat dan atau merekam proses observasi berupa aktivitas-aktivitas dalam lokal penelitian baik terstruktur maupun semistruktur yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden sebagai proses pengumpulan data, atau hanya menjadi non partisipan (pengamat).
- b. Interview (wawancara), interview atau wawancara menurut (Creswell, 2010) merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan proses Tanya jawab langsung terhadap informan. Wawancara yang dilakukan

oleh peneliti baik secara langsung (*face to face*), telepon atau media lainnya, maupun terlibat langsung dalam suatu kelompok informan tertentu. Pertanyaan yang diberikan dalam wawancara kualitatif umumnya bersifat tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*openended*) yang dengan sengaja diciptakan untuk memunculkan pandangan maupun opini dari pada informan wawancara. Agar proses pengumpulan informasi melalui wawancara berlangsung sistematis dan menyeluruh maka peneliti menggunakan suatu metode dalam melakukan wawancara dengan informan penelitian. Menurut (Herdiansyah, 2011).

#### 1. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur lebih sering digunakan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Beberapa ciri dari wawancara terstruktur meliputi daftar pertanyaan dan kategori jawaban telah disiapkan, kecepatan wawancara terkendali, tidak ada fleksibilitas mengikuti pedoman, dan tujuan wawancara biasanya untuk mendapatkan penjelasan tentang suatu fenomena.

#### 2. Wawancara semi-struktur

Wawancara semi-struktur lebih tepat dilakukan penelitian kualitatif dari pada penelitian lainnya. Ciri-ciri dari wawancara semi-struktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan

penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.

### 3. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur memiliki cirri-ciri, yaitu pertanyaan sangat terbuka, kecepatan wawancara sangat sulit diprediksi, sangat fleksibel, pedoman wawancara sangat longgar urutan pertanyaan, penggunaan kata, alur pembicaraan, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.

Metode wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian yang berjudul Koordinasi Pemerintahan Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi di Kelurahan Teluk Belitung Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Merbau adalah metode wawancara semi-struktur, alasan peneliti memakai metode semi-struktur yaitu selama proses wawancara berlangsung untuk mendapatkan informasi dari informan berjalan dengan sistematis dan informan pun dapat menyampaikan informasi mengenai Koordinasi Pemerintahan Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi di Kelurahan Teluk Belitung Kepulauan Meranti Kecamatan Merbau bebas dan leluasa tanpa dibatasi dengan daftar pertanyaan yang peneliti buat. Peneliti tetap memiliki daftar pertanyaan wawancara, namun dibarengi dengan pertanyaan bebas kepada informan yang berasal dari pernyataan-pernyataan informan yang sekiranya memunculkan pertanyaan baru kepada pihak dinas kabupaten kepulauan meranti.

#### c. Dokumentasi

Data yang diambil melalui dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data penelitian yang berkaitan dengan penelitian berjudul Koordinasi Pemerintahan Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi Di Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Data yang diambil dapat berupa file, foto dan lain sebagainya. Selama dalam proses penelitian, peneliti juga mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berupa dokumen public maupun dokumen (seperti Koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen private (seperti buku harian, diary, surat, e-mail).

Dokumentasi dalam penelitian ini penulis peroleh dari dokumentasi pribadi yang diberikan oleh instansi atau lembaga terkait dan beberapa dokumentasi pribadi yang di ambil di lokasi penelitian.

### **1.6 Analisis Data**

Dalam penelitian analisis data dilakukan saat peneliti telah mendapatkan data dari informan ataupun sumber data lainnya. Model analisis data menurut Huberman dan Miles dikutip dari (Idrus, 2009) disebut sebagai model interaktif. Model ini terdiri dari tiga proses utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Semua proses kegiatan tersebut saling menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Adapun model interaktif yang dimaksud secara umum digambarkan sebagai berikut:

#### **a. Reduksi Data**

Reduksi data dapat didefinisikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan, dan

transformasi data kasar yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut, cerita-cerita yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari Pemerintahan Daerah mengenai penanggulangan abrasi di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti baik data primer maupun sekunder yang berasal dari informan dianalisis dan dipilih sesuai dengan penelitian peneliti. Data atau informasi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang sesuai dengan fenomena yang terjadi kemudian dirangkum dan dikategorikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di lokasi penelitian mengenai Koordinasi Pemerintahan Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi di Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mencapai tujuan akhir penelitian.

#### b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data. Penyajian data menurut Miles dan Huberman (Idrus, 2009) sebagai informan tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lokasi penelitian disajikan dalam bentuk catatan hasil wawancara, catatan

observasi lapangan dan catatan dokumentasi kemudian disusun agar memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi sesuai dengan fenomena dan apa yang harus dilakukan oleh peneliti serta agar peneliti dapat melakukan analisis dengan cepat dan mudah. Data yang didapatkan dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang didokumentasi mengenai penanggulangan abrasi di Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kepulauan Meranti kemudian disajikan dalam bentuk tulisan berdasarkan hasil informasi maupun data-data yang didapatkan selama penelitian.

c. Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Tahap akhir Dari model interaktif adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Tahap ini dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti menarik kesimpulan yang didukung dengan hasil dari pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan yang ditarik adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai Koordinasi Pemerintahan Daerah dalam Penanggulangan Abrasi di Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kepulauan Meranti. Kemudian kesimpulan yang ditarik oleh peneliti melalui proses verifikasi agar kesimpulan yang ditarik benar-benar merupakan kesimpulan final.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Merbau

Merbau adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia yang memiliki ibu kota di Teluk Belitung. Kecamatan Merbau merupakan kawasan penghasil minyak bumi dan gas alam. Di kawasan ini sudah berdiri PT. Kundur Petroleum S.A. yang beroperasi di daerah Kurau, Desa Lukit, yang mampu memproduksi minyak mentah 8.500 barel/hari, merupakan anak perusahaan asing dari Amerika Serikat. Setelah beberapa kali pemindahan kepemilikan, PT. Kundur Petroleum S.A. dimiliki oleh Energi Mega Persada (EMP) dengan saham 60,49% yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan Bakrie Group. Kundur Petroleum S.A. merupakan operator dari Block Malacca Starit PSC.

Kecamatan Merbau meliputi secara keseluruhan Pulau Padang seluas 1109 km<sup>2</sup> atau 110.000 ha. Di barat Pulau Padang terdapat Sumatera, di timurnya ada Pulau Merbau, di tenggara ada Pulau Rantau, dan di seberang utara ada Pulau Bengkalis. Panjang Pulau Padang dari utara ke selatan adalah (+-) 60km, lebarnya (+-)29km dan seluruhnya dataran rendah. Pulau Padang merupakan lahan/tanah rawa gambut dengan ketebalan gambut mencapai 6 meter lebih. Hasil uji pengeboran 4 kilometer dari bibir pantai tepatnya di RT 01 RW 03 dusun 03 desa lukit. Dan pada jarak 5 kilo meter dari bibir pantai mencapai kedalaman 5.8 meter. (Tim Pengkaji Gambut dari UGM bekerja sama dengan ICRAF Bogor, Universitas Utrick Belanda dan Unri bersama-

sama dengan masyarakat Pulau Padang). Pulau Padang terdiri dari 1 kelurahan dan 8 desa. Semuanya dalam naungan Kecamatan Merbau dan Kecamatan Tasik Putri Puyu. Kecamatan Merbau saat ini hanya melingkup satu Pulau Padang. Kecamatan Merbau terdiri dari 1 Kelurahan dan 8 Desa:

1. Desa Bagan Melibur
2. Desa Lukit
3. Desa Mayang Sari
4. Desa Mekar Sari
5. Desa Meranti Bunting
6. Desa Pelantai
7. Desa Sungai Anak Kamal
8. Desa Sungai Tengah
9. Desa Tanjung Kulim
10. Kelurahan Teluk Belitung

Letak Geografis Kecamatan Merbau sangat strategis yaitu berada pada lintasan pelayaran Dumai, Bengkalis, Selat Panjang, Batam dimana kota-kota tersebut merupakan pusat-pusat perkembangan skala nasional dan berskala internasional. Kecamatan Merbau mempunyai potensi minyak yang cukup layak untuk dieksploitasi oleh PT. Kondur. Namun dampak potensi tersebut terhadap perkembangan kawasan perencanaan (terutama terhadap perkembangan fisik) masih kurang dilaksanakan oleh masyarakat. Potensi sumber daya alam melimpah terutama dari sector perkebunan, pertanian dan

perikanan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Lahan untuk pengembangan kegiatan yang belum dimanfaatkan relative masih luas.

## **B. Sejarah singkat Kelurahan Teluk Belitung**

Sejarah Kelurahan Teluk Belitung diperoleh dari beragam sumber mulai dari wawancara beberapa tokoh masyarakat. Studi literatur dan diskusi terfokus yang dilakukan di desa sebab beberapa didapatkan bersifat parsial sehingga harus dikonfirmasi melalui studi literature, perbandingan data hasil wawancara dan diskusi kampung. Adapun sejarah Kelurahan Teluk Belitung yang berhasil dihimpun sebagai berikut.

Sebelum Indonesia merdeka, Kelurahan Teluk Belitung disebut dengan penghulu Teluk Belitung berada dalam lingkungan Distrik Merbau, Kerajaan Siak yang berdiri sampai tahun 1942. Kecamatan Pemerintahan Merbau pada saat itu disebut Distrik Merbau dengan Ibu Negerinya Teluk Belitung dibawah Onder Distrik Tebing Tinggi, awalnya Kemerdakaan Republik Indonesia Distrik Merbau menjadi Kecamatan Merbau dibawah Kedewanan Selat Panjang.

Berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 1956 lahirlah Kabupaten Bengkalis yang berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Tengah dan setelah Provinsi Sumatera Tengah dipecah menjadi 3(tiga) Provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi dan Riau, maka lahirlah Provinsi Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 dan Kabupaten Bengkalis masuk dalam wilayah Provinsi Riau, sejak lahirnya Kabupaten Bengkalis maka Kecamatan Merbau menghimpun/mempunyai 10(sepuluh) desa dan 1(satu) Kelurahan

maka lepas dari Kewedanan Selat Panjang dan langsung di bawah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tanggal 16 Januari 2009 terbentuklah Kabupaten Kepulauan Meranti yang beribukota di Selatpanjang, oleh karena Kecamatan Merbau dibawah Onder Distrik Tebing Tinggi pada masa Pemerintahan Kerajaan Siak maka Kecamatan Merbau secara Administrasi ke Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk efesiensi dan memacu lajunya pemabngunan serta pemerataan dan untuk menggerakkan roda Pemerintahan dan kemasyarakatan Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan pemekaran Kecamatan dan Desa termasuk Kecamatan Merbau dimekarkan menjadi 3(tiga) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Merbau, Kecamatan Pulau Merbau yang terletak di Pulau Merbau dan Kecamatan Putri Puyu. Kecamatan Merbau Terdiri dari 1(satu) Kelurahan dan 9(Sembilan) Desa, yaitu: Kelurahan Teluk Belitung, Desa Bagan Melibur, Desa Mayang Sari, Desa Mekar Sari, Desa Sungai Anak Kamal, Desa Pelantai, Desa Meranti Bunting, Desa Sungai Tengah, Desa Tanjung Kulim dan Lukit.

Kelurahan Teluk Belitung yang berada di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, secara administrasi Kelurahan Teluk Belitung berbatasan dengan desa-desa dalam satu Kecamatan serta desa-desa yang berada di luar Kecamatan Merbau. Adapun batas-batas Kelurahan Teluk Belitung, yaitu:

- Sebelah Utara Kelurahan Teluk Belitung berbatasan langsung dengan Desa Bagan Melibur ditandai dengan Patok Beton (Koordinat N;01.05670<sub>0</sub>E;102.43422<sub>0</sub>).
- Sebelah Timur Kelurahan Teluk Belitung berbatasan dengan Selat Asam.
- Sebelah Selatan Kelurahan Teluk Belitung berbatasan dengan Desa Mekar Sari ditandai dengan Sungai Kengkam (N;01.03079<sub>0</sub>E;102.44905<sub>0</sub>).
- Sebelah Barat Kelurahan Teluk Belitung berbatasan dengan Desa Lukit berdasarkan pemetaan partisipatif Desa Peduli Gambut tahun 2020 di Kelurahan Teluk Belitung. Luas wilayah Kelurahan ini adalah 6.043,46 hektare (ha) atau 60,43 kilometer<sub>2</sub> (km<sub>2</sub>) yang terdiri dari wilayah daratan seluas 5.666,91 ha serta tubuh air seluas 376,55 ha. Luas hasil pemetaan partisipatif ini yang selanjutnya akan digunakan sebagai luas wilayah dalam (laporan profil desa peduli Gambut Kelurahan Teluk Belitung Tahun 2020).

### C. Data Umum Penduduk

Data jumlah penduduk di Kelurahan Teluk Belitung berdasarkan laporan penduduk bulanan di awal tahun 2021 secara keseluruhan mencapai 7.578 jiwa penduduk, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.610 Kepala Keluarga (KK) Jumlah Penduduk laki-laki dan perempuan memiliki selisih sekitar 46 jiwa di mana jumlah laki-laki lebih banyak yakni mencapai 50,30% dari total penduduk sedangkan penduduk perempuan sekitar 49,69% dari total penduduk Kelurahan Teluk Belitung. Dari seluruh KK yang ada terdapat

18,81% kaum perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga ini membutuhkan perhatian masyarakat mengingat biasanya mereka menjalankan peran ganda sebagai kepala keluarga sekaligus ibu bagi kepala keluarga perempuan yang masih mempunyai tanggungan dan mengasuh anak. Adapun jumlah penduduk dari KK berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.1 jumlah penduduk dan Kepala Keluarga di Kelurahan Teluk Belitung berdasarkan jenis kelamin**

Jumlah Penduduk		Total
Laki-laki	Perempuan	
3.812	3.766	7.578
Jumlah Kepala Keluarga		Total
Laki-laki	Perempuan	
1.307	303	1.610

Sumber Data: Kantor Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau

Dari tabel di atas tampak bahwa jumlah penduduk Kelurahan Teluk Belitung yang berjenis kelamin laki-laki 3.812 dan berjenis kelamin perempuan 3.766 sehingga memiliki total sebanyak 7.578. dari jumlah tersebut terdapat jumlah Kepala Keluarga yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.307 dan Kepala Keluarga berjenis kelamin perempuan sebanyak 303 dan memiliki total 1.610 Kepala Keluarga.

#### **D. Tingkat Kepadatan Penduduk**

Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu wilayah per satuan luas, atau dengan kata lain perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk tiap satu

kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut.

Adapun luas wilayah Daratan Kelurahan Teluk Belitung adalah 5.634,01 hektare atau 56,34 kilometer<sup>2</sup> (km<sup>2</sup>) sedangkan jumlah penduduk di awal tahun 2021 berjumlah 7.578 jiwa. Dari data ini, dapat dihitung kepadatan penduduk Kelurahan Teluk Belitung adalah sebesar 134 jiwa/km<sup>2</sup> yang berarti bahwa setiap 1 kilometer<sup>2</sup> lahan di Kelurahan Teluk Belitung dihuni oleh 134 jiwa.

Sedangkan Kecamatan Merbau dimana Kelurahan Teluk Belitung mempunyai luas wilayah 477,8km<sup>2</sup> dengan jumlah pada tahun 2019 adalah 14.439 jiwa (BPS Kab. Meranti,2020), dengan luas dan jumlah penduduk tersebut maka angka kepadatan Kecamatan Merbau adalah 30 jiwa/km<sup>2</sup>.

Dengan membandingkan antara tingkat kepadatan Kelurahan dan Kecamatan maka tingkat kepadatan penduduk Kelurahan Teluk Belitung adalah Tingkat Kepadatan Penduduk Tinggi. Disebut Tingkat Kepadatan Tinggi karena angka Kepadatan Kelurahan Teluk Belitung lebih tinggi dari angka Kepadatan Penduduk Kecamatan Merbau.

#### **E. Etnis, Bahasa dan Agama**

Kelurahan Teluk Belitung merupakan salah satu Kelurahan yang memiliki beragam etnis yang ditandai dengan ragam karakteristik masyarakatnya, mulai dari buaya, adat istiadat, bahasa dan sebagainya. Adapun etnis yang ada di Kelurahan Teluk Belitung adalah Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Tionghoa, Suku Akit, Suku Bugis, Suku Minang dan Suku Batak. Hubungan

antar Suku terjalin dengan baik karena tidak pernah ada perpecahan dan masalah di Kelurahan yang dipicu oleh latar belakang kesukuan. Hubungan harmonis antar suku ini dapat dilihat dengan sikap saling menghargai perbedaan satu dengan yang lain. Di Kelurahan Teluk Belitung jumlah penduduk berdasarkan etnis dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.2 jumlah Penduduk berdasarkan Etnis di Kelurahan Teluk Belitung**

SUKU	JIWA	PERSEN
Melayu	4.957	65,41%
Jawa	349	4,60%
Tionghoa	771	10,17%
Bugis	115	1,51%
Batak	263	3,47%
Miang	389	5,13%
Anak Dalam/Akit	677	8,93%
Sembawa	30	0,39%
Nias	27	0,35%

Sumber Data: Kantor Kelurahan Teluk Belitung

Adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu Merbau-Riau dengan ciri-ciri huruf vocal pada akhir kata selalu diakhiri “e” dan “o”. Selain itu, bahasa lokal juga digunakan oleh setiap suku di Kelurahan ini ketika berkomunikasi dengan sesama suku yang saling mengerti dengan bahasa lokal masing-masing. Di Kelurahan Teluk Belitung jumlah penduduk berdasarkan Agama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kelurahan Teluk Belitung**

AGAMA	JUMLAH JIWA
Islam	5.491
Kristen	940
Katolik	27
Budha	1.120
TOTAL	7.578

Sumber Data: Kantor Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas agama di Kelurahan Teluk Belitung adalah Islam sebanyak 5.491 Jiwa atau 72,45% dari 7.578 Jiwa Kelurahan dan kemudian diiringi dengan agama Budha dengan jumlah 1.120 Jiwa atau 14,77%, sedangkan agama lain hanya sebagian kecil seperti Konghucu, Kristen dan Katolik. Karakter keIslaman di Kelurahan Teluk Belitung begitu mencolok karena pakaian ciri khas muslim yang digunakan masyarakat sehari-hari seperti jilbab dan laki-laki memakai peci. Selain itu tempat ibadah yang paling banyak adalah masjid dan musholla sedangkan yang lain untuk kepercayaan konghucu memiliki tempat ibadah berupa kelenteng. Namun jumlahnya hanya satu unit di RT02/RW05 dan dua unit Gereja berada di RT03/RW05 Kelurahan Teluk Belitung.

Kelurahan Teluk Belitung juga memiliki nuansa Islami yang begitu menonjol, terlihat dari jenis pakaian keseharian masyarakat desa yang menggunakan jilbab bagi perempuan bahkan untuk anak usia sekolah TK sampai orangtua. Sedangkan laki-laki menggunakan kopiah dan koko/gamis (jubah) yang selalu terlihat meramaikan masjid. Terlebih lagi acara pengajian mingguan yang selalu diadakan di rumah warga atau musholla dalam lingkup RW maupun RT juga dilakukan setiap kelompok pengajian.

## F. Sejarah Teluk Belitung

Sejarah yang paling berkesan bagi masyarakat di Kelurahan Teluk Belitung adalah lagenda terbentuknya nama “Teluk Belitung” itu sendiri. Teluk Belitung dulunya adalah sebuah pulau pesisir yang ada sejak tahun 1600-an. Yang kononnya Kelurahan Teluk Belitung berasal dari kata “Teruk Berhitung” (lelah menghitungnya) hasil dari hasil rampokan. Teluk Belitung merupakan pantai pesisir Teluk Asam, yang pada zaman dahulu Teluk Belitung merupakan sebuah perkampungan kacil dan dan menjadi persinggahan para lanun atau perampok setelah melakukan sebuah kegiatan perampokan di laut khususnya di Selat Melaka.

Menurut cerita mereka melakukan pembagian hasil rampokan tersebut di suatu tempat yang bernama Teluk Pedas yang merupakan daerah sentral dari marker para lanun. Di dalam hasil rampokan tersebut, salah satu perampok tersebut tidak puas hati karena ia tidak mendapatkan perlakuan adil dari teman-temannya dan memilih menetap di Teluk Belitung dan bertobat sampai akhir hayat sebagai tempat pemakaman terakhir yang telah di yakini masyarakat setempat yang terletak di Sungai Marambai dan diatas pusaranya tumbuh satu batang pohon yang dikenal masyarakat dengan sebutan Pohon Delik.

Adapun asal kata “Teluk Belitung” adalah dari kata “Teruk Berhitung”, perubahan ini terjadi karena kebiasaan pengungkapan kata “Teruk Berhitung” oleh masyarakat setempat yang sehingga lama-kelamaan menjadi “Teluk Belitung”.

Teluk Belitung pada waktu itu tidak dapat membuka untuk perluasan wilayah sebagai anak perkampungan sebagaimana sekarang ini, karena setiap kali masyarakat ingin membuka wilayah mereka sering dapat gangguan-gangguan dari makhluk halus (jin). Dengan kondisi daerah yang sedemikian, datanglah dua orang pendatang anak dari Noyang Landa yang bernama Tuk Kitang dan Khatib Ahmad dan dari kerja keras merekalah kawasan Teluk Belitung dapat dibuka menjadi wilayah perkampungan. Proses pembukaan wilayah perkampungan ini diawali dengan kehadiran mereka yang datang dan mencoba membuka lahan tetapi tetap saja mendapat gangguan dari makhluk halus.

Pada suatu malam salah seorang dari mereka mendapat mimpi bahwa jika ingin membuka kawasan (perkampungan baru) terlebih dahulu harus mengelilingi Pulau Padang dengan menggunakan sampan (perahu), kemudian setelah selesai mengelilingi Pulau Padang dilanjutkan dengan pembacaan-pembacaan tahlil dan doa diatas kuburan (makam) yang terletak di Sungai Merambai yang dalam hal ini sebagai tempat kuburan keramat dilingkungan tersebut dengan mengenal namanya dari beberapa sumber cerita adalah Datuk H.Abdullah. Setelah tafsir mimpi tersebut dilakukan oleh Tuk Kitang dan Khatib Ahmad serta dibantu masyarakat pada waktu itu, maka semua yang menjadi hambatan dapat terlaksana dan tidak ada lagi gangguan-gangguan dari makhluk halus, sehingga saat ini Teluk Belitung berkembang pesat menjadi sebuah Kelurahan dan menjadi pusat Ibukota Kecamatan Merbau (Distrik Merbau).

### G. Kesenian Tradisional

Kesenian tradisional adalah salah satu kearifan lokal yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Teluk Belitung pada hari-hari tertentu yang dianggap penting untuk diperingati misalnya Kompang, Rebana, Gendang, Zapin, Orkes China, Pencak Silat dan Barongsai.

Kesenian tradisional ini diadakan untuk memeriahkan acara-acara besar dan penting di sector keagamaan seperti hari raya besar Islam dan kegiatan lainnya. Selain itu juga digunakan sebagai salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para tamu, juga orang-orang tertentu di Kelurahan atau tempat acara.

### H. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Hasil pemetaan partisipatif di Kelurahan Teluk Belitung menunjukkan bahwa sekitar 1.350 hektare (60,39%) penggunaan lahan di wilayah ini merujuk pada kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang dapat dilihat berdasarkan adanya kebun masyarakat yang ditanami kelapa, pinang, karet dan sagu serta kebun campuran. Kegiatan pertanian di Kelurahan Teluk Belitung memang masih menjadi mata pencarian sebagian masyarakat oleh karena itu di Kelurahan Teluk Belitung tentunya sangat identik dengan kegiatan pengolahan lahan pertanian. Pemanfaatan lahan, baik di tanah gambut maupun alluvial, di masa lalu merupakan kearifan lokal dalam mengelola lahan, yaitu dengan teknis yang dalam istilah lokal *memerun* (membakar lahan) dimulai dengan

menebas semak belukar dan rumput, membersihkan tebasan untuk ditumpuk dan dibakar hingga menghasilkan abu yang berfungsi sebagai pupuk.

Memerun dilakukan karena pertumbuhan tanaman menjadi lebih subur, biaya pengolahan lahan kecil, tenaga yang sedikit dan waktu yang cepat. Teknik pembakaran ini juga meliputi control terhadap api agar tidak melebar ke mana-mana dengan cara penumpukan dan pembersihan bara api yang terlokalisir. Setelah itu tanah tersebut dibiarkan sekitar setengah bulan kemudian diolah dengan memulai penanaman. Kegiatan bercocok tanam di Kelurahan Teluk Belitung dilakukan hampir sama dengan tradisi lokal yang dilakukan masyarakat diseluruh Kecamatan Merbau. Dulunya komoditas yang dominan ditanam pada lahan kebun milik warga adalah tanaman karet, sagu, kelapa, durian, sayuran dan palajiwa. Sedangkan pinang dibudidayakan sejak 2000-an.

Setelah adanya larangan membakar lahan, masyarakat hanya membersihkan lahan dan ditumpuk kemudian ditunggu sampai lapuk dan membusuk dengan sendirinya. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Dengan teknik seperti itu rumput yang membusuk bisa berfungsi sebagai pupuk dan kebanyakan tidak dimanfaatkan karena terbatasnya ilmu pengetahuan tentang pengelolaan dan pembuatan pupuk dari pahan organic.

Selain itu masyarakat saat ini sudah menggunakan racun untuk mematikan semak agar tidak perlu ditebas untuk menyingkirkan semak belukar. Setelah diberi racun, maka rumput tersebut ditunggu hingga membusuk dan kemudian 1 bulan setelahnya barulah bisa ditanami. Untuk menstabilkan zat asam yang

terkandung dalam tanah gambut, masyarakat juga melakukan pengapuran setelah pembersihan lahan dilakukan kemudian didiamkan selama setengah bulan lalu bisa ditanami khususnya untuk tanaman palajiw. Sedangkan untuk menyuburkan tanaman juga menggunakan pupuk.

Namun karena adanya banyak aturan yang melarang membakar lahan, sebagian masyarakat mengurangi luasan wilayah garapan. Hal ini mereka lakukan dengan alasan karena untuk mengolah hektaran lahan dibutuhkan modal dan biaya yang tinggi untuk membeli pupuk, racun rumput dan menggunakan tenaga ekstra untuk mengerjakan semua itu. Belum lagi jika harus menggaji buruh untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan waktu berhari-hari. Dengan penurunan luasan lahan garapan yang mampu dikerjakan oleh para petani, maka berdampak pada penurunan jumlah produksi pertanian yang mampu dihasilkan terutama sagu dan pinang.

### **I. Pemerintahan dan Kepemimpinan**

Terbentuknya pemerintahan di Kelurahan Teluk Belitung sudah sejak masa Kesultanan Siak, karena pada masa itu Pulau Padang (termasuk Teluk Belitung) merupakan wilayah Provinsi Merbau di bawah Kesultanan Siak. Kesultanan Siak akhirnya dipaksa tunduk oleh Belanda melalui perjanjian tahun 1916, bersamaan dengan itu Provinsi Merbau dihapuskan menjadi District Selat Panjang (Masyukri & Kubyo, 1983). Saat itu, Teluk Belitung dijadikan pusat pemerintahan *Onderdistrict* Merbau di bawah District Selat Panjang. (Masyukri & Kubyo, 1983). Ketika tuntutan Belanda semakin menguat ke Kerajaan Siak untuk melepas beberapa wilayahnya, Teluk Belitung menjadi bagian wilayah

*Onderafdeeling* Selat Panjang di bawah *Afdeeling* Bengkalis (Masyukri & Kubyo, 1983).

Sejak menguatnya penjajahan Belanda tahun 1916, mulailah dikenal system kepemimpinan kampong-kampung berupa kepenghuluan yang dipimpin oleh Penghulu (Kepala Kampung). (Masyukri & Kubyo, 1983) Kepala Kampung pertama yang ditetapkan di Kelurahan Teluk Belitung (sebelum menjadi Kelurahan) adalah Kepenghuluan Teluk Belitung mulai dari tahun 1929 sampai dengan 1981 yang dimulai dari Penghulu Nendout, Penghulu Manan, Penghulu Hamid, Penghulu Jamal Johan. Masuk tahun 1981 Jamal Johan dilantik menjadi Lurah Teluk Belitung karena pada saat itu Kepenghuluan Teluk Belitung di ubah menjadi Kelurahan Teluk Belitung dan jabatan Jamal Johan sampai 14 Desember 1985, setelah itu Efendi Yasin Dilantik sebagai Pelaksana Tugas (PLT) pada Tanggal 15 Desember 1985 sampai 18 Agustus 1988, kemudian Efendi yasin dilantik menjadi Lurah pada tanggal 19 Agustus 1988 sampai masa jabatannya pada tanggal 31 Desember 1991, kemudian dilantik Ismail sebagai Lurah Teluk Belitung pada tanggal 02 Januari 1992 sampai berakhir jabatannya pada tanggal 06 Agustus 2010, kemudian dilanjutkan oleh Suyatno, S.Pd pada tanggal 07 Agustus 2010 sampai akhir jabatannya pada tanggal 08 April 2011.

Kemudian dilanjutkan dengan Abdul Munir, SH sebagai PLT pada tanggal 09 April 2011 sampai akhir jabatannya pada tanggal 17 April 2012, kemudian dilanjutkan dengan Tengku Mahadar pada tanggal 18 April 2012 sampai akhir jabatannya pada tanggal 29 Agustus 2012, kemudian dilanjutkan dengan Kamsiatun, S.HUM pada tanggal 30 Agustus 2012 sampai akhir jabatannya pada

tanggal 05 Januari 2017 dan dilanjutkan dengan Indat, A.Ma.Pd pada tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan sekarang. Adapun pergantian pemerintahan Kelurahan Teluk Belitung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.4 Pergantian Pemerintahan Kelurahan Teluk Belitung**

TAHUN (PERIODE)	NAMA PEMIMPIN	JABATAN
-	Nendot	Penghulu
-	Manan	Penghulu
-	Hamid	Penghulu
-	Umar	Penghulu
1961-14 Des 1985	Jamal Johan	Lurah
15 Des 1985 – 18 Agustus 1988	Effendi Yasin	PLT
19 Agus 1988 – 31 Des 1991	Effendi Yasin	Lurah
12 Jan 1991 – 05 Juni 2000	Ismail	Lurah
06 Juni 2000 – 06 Agus 2010	Syufri	Lurah
07 Agus 2010 – 08 Agus 2011	Suyanto, S.Pd	Lurah
09 April 2011 – 17 April 2012	Abdul Munir, SH	PLT
18 April 2012 – 29 Agus 2012	Tengku Mahadar	Lurah
30 Agus 2012 – 05 Jan 2017	Kamsiatun, S.Hum	Lurah
06 Jan 2017 – Sekarang	Indat, A.Ma.Pd	Lurah

Sumber Data: Kantor Kelurahan Teluk Belitung

Struktur organisasi pemerintah Teluk Belitung dipimpin oleh seorang Lurah, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat lunak. Perangkat Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris Lurah; Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan; dan Admin Kelurahan. Selain itu juga terdapat 5 (lima) Ketua Rukun Warga (RW) dari 23 Ketua Rukun Tetangga (RT). Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah Kelurahan Teluk Belitung diawasi oleh LPMK yang merupakan perwakilan dari rakyat di kelurahan. Jabatan Lurah dan perangkat

kelurahan lainnya ditentukan melalui penunjukan langsung oleh Bupati kota waringin Timur dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati. Adapun struktur pemerintahan kelurahan dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini:

**Tabel IV.5 Struktur Pemerintahan Kelurahan Teluk Belitung**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH	NOMOR DAN TANGGAL SK	PEJABAT YANG MENETAPKAN
1	INDAT, A.Ma.Pd	Lurah	1	Kpts.821.4/I/2017/009	Bupati
2	HJ. WAN JUMIATI,SE	Sekretaris Kelurahan	1	Kpts.821.4/I/2020/003	Bupati
3	SYAFRIZAL, SE	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Kpts.821.4/I/2020/003	Bupati
4	ISKANDAR	Seksi Pembantu Keuangan Kelurahan	1	Kpts.821.2/x/2019/140	Bupati

Sumber Data: Kantor Kelurahan Teluk Belitung

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Hasil Penelitian Koordinasi Pemerintahan Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti**

Berkurangnya daratan yang terdapat di wilayah pesisir yang disebabkan oleh proses pengikisan pantai oleh kekuatan gelombang laut dan arus laut yang besar serta terjadi secara berkesinambungan sehingga bersifat merusak. Dengan abrasi pantai ini sudah jelas daerah wilayah daratan di Kabupaten Kepulauan Meranti makin berkurang setiap tahunnya, diketahui dengan abrasi pantai yang begitu parah akan memperluas suatu pantai di daerah tersebut. Adapun untuk pengukuran suatu perbatasan Negara atau wilayah perairan berdasarkan bibir pantai suatu wilayah jelas menunjukkan bahwa luas wilayah perairan Indonesia yang berada di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami permasalahan yang cukup kongkrit, semakin luas pantai yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti maka semakin memperkecil luas Negara Indonesia, bahkan dengan abrasi pantai ini membuat keuntungan bagi Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Masalah abrasi menjadi masalah serius di pesisir Riau. Salah satunya di Kelurahan Teluk Belitung yang mengalami abrasi dan bagi pemukiman masyarakat yang berada di pinggir pantai merasa terancam oleh pengikisan tanah pantai yang semakin berkurang dan abrasi di Kelurahan Teluk Belitung rata rata

mencapai 2 meter pertahunnya dan semakin meningkat. Abrasi di Kelurahan Teluk Belitung yang terancam terbelah akibat dampak dari dorongan air laut yang terus menggerus daratan, yang dikhawatirkan apabila abrasi ini tidak segera ditangani secara serius maka Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau bisa terbelah bahkan hilang, dimana warga setiap hari menyaksikan tanah pinggir pantai dimakan ombak dan warga sudah akrab dengan atraksi tanah jatuh kelaut. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki delapan isu strategis, pertama kualitas pendidikan, kedua kualitas kesehatan, ketiga infrastruktur dasar, keempat abrasi, kelima optimalisasi potensi daerah, keenam perdagangan lintas batas, ketujuh darurat narkoba, kedelapan kemiskinan dan pengangguran. Dari delapan isu ini abrasi merupakan isu nasional yang menimbulkan dampak parah namun masih saja belum di tanggulangi dengan menggunakan kajian teori koordinasi ada 5(lima) yang mempengaruhi keberhasilan atau tercapainya tujuan suatu Penanggulangan Abrasi, lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

### **5.1.1 Komunikasi**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada pihak komunikan Konsep komunikasi merupakan sebuah proses untuk mempengaruhi orang lain. Komunikasi di dalam indicator koordinasi dapat mencakup beberapa dimensi penting yaitu,ada tidaknya informasi,ada tidaknya alur informasi,dan ada tidaknya teknologi informasi.Suatu koordinasi tidak akan berhasil tanpa ada sebuah komunikasi .

Menurut Louis Forsdale seorang ahli komunikasi dan pendidikan seperti yang ditulis oleh Arni Muhammad, "*Communication is the process by which*

*system is established, maintained and altered by means of shared signals that operated according to rules*". Yang artinya komunikasi adalah suatu proses memberikan signal menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini suatu sistem dapat didirikan, dipelihara dan diubah. Sedangkan menurut William J Seller komunikasi adalah proses dimana symbol verbal dan nonverbal dikirimkan, diterima dan diberi arti.

Menurut Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan definisi bencana sebagai peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik factor alam dan/atau factor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi.

Komunikasi antar organisasi perangkat daerah dalam penanggulangan abrasi di Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau menimbulkan tanda tanya baru bagi penulis,hal ini sebagaimana wawancara dengan Ibu Tengku Nurbaiti, S.Pd selaku staff umum di Kelurahan Teluk Belitung yaitu:

*“Banyak beberapa kegiatan yang terkandala di dalam penanggulangan abrasi ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara dinas Kecamatan dan dinas Kabupaten,kami di Kelurahan hanya sebagai tempat untuk pengambilan data dan ketika dinas Kabupaten meminta data pun tidak begitu jelas dinas apa yang meminta data abrasi tersebut,data yang di minta tidak setiap tahunnya maka dari itu penanggulangan abrasi di Kelurahan ini tidak terlalu di perhatikan” (25 Mei 2021)*

Berdasarkan dari hasil wawancara bersama Ibu beti di atas bahwa di dalam komunikasi ini tidak berjalan dengan lancar sehingga dinas Kecamatan dan dinas

Kabupaten seperti tidak begitu peduli terhadap abrasi yang terjadi Kelurahan Teluk Belitung karna dari tahun ketahun perubahan yang terjadi sangat sedikit.

Komunikasi antar Dinas yang terkait dalam penanggulangan abrasi masih banyak nya info atau permasalahan yang tidak tersampaikan dengan jelas sehingga menimbulkan kesalah pahaman antara dinas satu dan yang lainnya. Sesuai dengan apa yang disampaikan bapak Izhar.Z selaku karyawan honorer pada wawancara di bawah:

*“Pemerintahan dinas Kabupaten hanya menyampaikan hal yang menyangkut tentang abrasi ke dinas Kecamatan saja tetapi dinas Kecamatan tidak begitu tau tentang abrasi karna yang mengelola permasalahan itu di Kelurahan sehingga terjadi tidak sesuainya penyampaian yang di sampaikan di awal dan apa yang disampaikan ke pihak Kelurahan. Bahkan ketika Dinas Kabupaten mengecek lokasi yang terdampak abrasi saja kelurahan tidak mendapatkan informasinya karena Dinas Kabupaten hanya memberitahu kepada Dinas Kecamatan” (25 Mei 2021).*

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa yang terjadi di lapangan yaitu kurangnya kepedulian dan tidak optimalnya Dinas Pemerintah terhadap penanggulangan abrasi di Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau.

### **5.1.2. kerjasama**

Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam koordinasi juga terdapat kerja sama antara dinas satu dan dinas lainnya dan juga kerja sama ini harus di perhatikan.

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa kerjasama Daerah dilaksanakan untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan public serta saling menguntungkan. Kerjasama Daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga, dan pemerintah daerah atau lembaga diluar negeri.

Menurut Edralin dalam Keban (2007: 9), dalam kerja sama harus dipegang teguh prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai. Prinsip ini harus menjadi pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme kerja sama. Dalam wawancara di bawah peneliti masih bersama bapak Izhar. Z menyatakan bahwa:

*“selama ini yang terkait di dalam penanggulangan abrasi dari Kabupaten sendiri yaitu dinas PU yang mengelola tentang pembangunan turap dan dinas Kecamatan hanya sebagai perantara antara dinas Kabupaten ke Kelurahan sebagai pengelola data abrasi tersebut. Namun dilihat kerjasamanya Dinas Pemerintahan pernah bekerjasama dengan perusahaan yang ada di Kecamatan Merbau untuk pembuatan jalan yang terkikis ombak serta pembuatan turap” ( Mei 2021)*

Dari wawancara di atas telah dijelaskan bahwa penanggulangan abrasi tersebut juga menarik perhatian Perusahaan karena melihat kondisi jalanan yang di pinggir pantai juga habis di kikis oleh ombak sehingga Perusahaan ikut membantu di dalam permasalahan ini.

Wawancara bersama bapak Izhar. Z ini kembali menyatakan bahwa:

*“yang jadi kendala saat ini bukan hanya tidak di perhatikan tentang abrasi tetapi juga di kelurahan terdapat banyak jalanan yang rusak sehingga masyarakat sering mengeluh. Hal itu disebabkan karena minimnya anggaran dari Kabupaten untuk Kelurahan Kecamatan Merbau tersebut bisa di bilang anggaran tersebut tidak pernah ada” ( Mei 2021)*

Dari hasil wawancara yang dilakukan, maka diketahui bahwa anggaran di Kelurahan Teluk Belitung terbatas. Bahkan pekerjaan yang seharusnya di tangani oleh Pemerintahan Daerah tetapi malah di kerjakan oleh Perusahaan karena minimnya anggaran dari Kabupaten.

### 5.1.3. Pembagian Tugas

Menurut Herujito (2006: 123) mengatakan bahwa koordinasi adalah suatu usaha kerja dari berbagai orang/kelompok, sehingga koordinasi dapat diartikan sebagai proses dalam melakukan spesialisasi kerja dari berbagai instansi yang mempunyai kegiatan kerja yang berbeda-beda sehingga dapat menjadi suatu kesatuan yang utuh dan terintegrasi secara efisien. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewajiban kepada kepala daerah untuk bekerjasama dan membagi tugas kewajibannya dengan wakil kepala daerah.

Dalam wawancara peneliti bersama ibu Hj. Wan Jumiaty, SE menyatakan bahwa:

*“Semua dinas yang terkait di dalam Penanggulangan Abrasi ini telah dibagi tugas dengan kapasitas masing-masing tetapi tidak ada satu pun kerja yang terealisasi oleh nya dan terbengkalai begitu saja masalah abarasi ini”*

Dari wawancara di atas terdapat bahwa Dinas tidak terlalu mengambil pusing tentang penanggulangan abrasi tersebut, seperti tidak memikirkan masyarakat yang tinggal di pinggir pantai yang terdampak abrasi.

Dalam wawancara peneliti bersama RT yaitu bapak Usman menyatakan bahwa:

*“kami hanya bisa menunggu pemerintah untuk turun dan membantu penanganan terhadap abrasi tersebut, karena setiap tahunnya abrasi ini mengikis pinggir pantai dan mengakibatkan jarak rumah dan daratan mulai jauh”.*

Dapat kita nilai sendiri bahwa Pemerintahan Daerah masih lalai terhadap apa yang terjadi di Kelurahan Teluk Belitung tersebut. Dalam hal ini Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten sudah di beri tugas nya masing-masing hanya saja tugas tersebut seperti tidak dipertanggung jawabkan oleh pihak keduanya dan membuat Perusahaan yang mengambil alih permasalahan itu.

#### **5.1.4. Pertemuan Rapat**

Menurut Ardhojo (2013: 67), dalam pelaksanaan pertemuan melalui rapat, peserta rapat harus terus melibatkan diri secara aktif. Bila itu rapat formal, peserta rapat seharusnya selalu mencatat untuk membantu mendengarkan dengan sungguh-sungguh atau mengeluarkan respon. Tetapi di dalam Koordinasi Pemerintahan Daerah dalam Penanggulangan Abrasi tersebut dalam wawancaranya ibu Tengku Nurbaiti, S.Pd menyatakan bahwa:

*“Setiap ingin mengusulkan rencana pembangunan atau pun kegiatan lainnya hanya dapat dilakukan saat musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), setiap tahun musrenbang di adakan dan setiap tahun pula kami mengajukan proposal untuk perbaikan jalan tetapi tidak pernah terealisasikan oleh pemerintah itu sendiri. Dan untuk masalah abrasi sendiri pun tidak ada pertemuan rapat khusus yang dilakukan oleh Pemerintah.*

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa tidak adanya pertemuan rapat khusus yang diadakan Pemerintah untuk membahas tentang Penanggulangan

Abrasi di Kelurahan Teluk Belitung. Kelurahan sendiri sudah seperti tidak mengerti bagaimana cara kerja Pemerintahan daerah tentang Penanggulangan Abrasi tersebut.

Wawancara peneliti dengan ibu HJ. Wan Jumiati, SE menyatakan bahwa:

*“Bukan hanya penanggulangan abrasi saja yang tidak di perhatikan bahkan ada hal lain yang lebih penting tetapi juga tidak diperhatikan yaitu kantor Kelurahan yang sampai saat ini tidak ada, kami hanya meminjam bangunan dinas untuk dijadikan kantor Kelurahan dan yang kami pinjam sekarang adalah mess pemda yang tidak di gunakan. Sebelum nya kami juga pernah menggunakan puskesmas lama sebagai tempat Kantor Kelurahan, karena setiap kami mengusulkan untuk membangun Kantor Kelurahan tidak pernah di respon oleh Pemerintah Daerah Kabupaten itu sendiri”.*

Dari beberapa wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa tidak ada terjadinya pertemuan rapat antara Dinas-dinas yang terkait dalam penanggulangan abrasi tersebut dan masih lalai dalam menangani masalah ini. Bahkan di dalam MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) pun sudah di ajukan banyak sekali permasalahan yang di bicarakan disaat musrenbang berlangsung, namun kenyataannya tidak ada satupun masalah yang terjadi di Kelurahan terselsaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti harus lebih memperhatikan lagi masalah masalah yang terjadi di setiap Kecamatan yang ada di Kepulauan Meranti sehingga tidak menimbulkan kecemeburuan antara Kecamatan satu dan Kecamatan lain.

## **B. Hambatan-hambatan dalam Koordinasi Pemerintahan Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti**

Dari hasil penelitian, maka dapat ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, hambatan-hambatan tersebut yaitu:

- a. Tidak adanya anggaran dari Pemerintahan Daerah sehingga menjadi faktor penghambat lainnya dalam Penanggulangan Abrasi di Kelurahan Teluk Belitung.

Dalam pelaksanaan penanggulangan abrasi ini sangat memerlukan dan guna kelancaran jalannya penanggulangan tersebut. Adanya dana tersebut berasal dari Pemerintahan Kabupaten , akan tetapi di dalam masalah penanggulangan abrasi ini tidak berjalan dengan lancar bahkan hampir terbengkalai begitu saja, oleh karena itu penanggulangan abrasi ini jadi terhambat.

- b. Di dalam pembagian tugas yang dilakukan Pemerintahan Daerah sudah sangat jelas, tetapi disini hanya saja tidak dilaksanakan dengan baik dan terlalu meremehkan permasalahan penanggulangan abrasi tersebut seperti tidak memikirkan nasib masyarakat yang tinggal di pinggir pantai dan rumah mereka hampir seperti berada di tengah laut karena tanah yang berada di pinggir pantai semakin terkikis oleh ombak laut.

Sementara itu upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan tugas Dinas Pemerintahan Kabupaten dan Dinas Kecamatan maupun Kelurahan yaitu:

- a. Melakukan koordinasi secara intensif tentang penanggulangan abrasi pada setiap Dinas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan untuk menyelaraskan Kebijakan, strategi dan upaya-upaya percepatan penanggulangan abrasi yang ada di Kelurahan Teluk Belitung.
- b. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi yang baik agar semua kegiatan yang dilakukan bisa terealisasi dengan sempurna dan tidak adanya tumpang tindih atau pun kerugian dari pihak manapun, serta untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten harus lebih memperhatikan cara kerja Dinas-dinas yang berada di Kepulauan Meranti agar Daerah tersebut bisa berkembang dan maju.
- c. Menyediakan pendanaan yang cukup, baik dari Pemerintahan tersebut. Hal ini diperlukan dalam penanggulangan abrasi atau pun permasalahan lainnya yang terjadi di Kelurahan Teluk Belitung, agar lebih meningkatnya kinerja Dinas Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang diperoleh berdasarkan observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara keseluruhan pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari yang telah dilakukannya komunikasi yang masih belum baik sepenuhnya, tindakan kerjasama yang masih kurang, pembagian tugas yang sudah jelas tetapi tidak melakukan tugasnya dengan baik, dan tidak terjadinya pertemuan rapat untuk menyelesaikan permasalahan.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Koordinasi Pemerintahan Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi di Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu:
  - a. Tidak adanya anggaran yang menjadi factor penghambat untuk penanggulangan abrasi.
  - b. Kurangnya Dinas yang terkait di dalam penanggulangan abrasi tersebut untuk melakukan tugasnya dengan baik dan benar.

#### B. Saran-saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten diharapkan untuk melakukan rapat khusus untuk membahas betapa pentingnya penanggulangan abrasi ini untuk

mencegah abrasi itu terjadi dan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitaran pinggir pantai

2. Untuk dapat meningkatkan kinerja dari setiap dinas maka harus adanya pengawasan oleh pihak Kepala Pemerintahan Daerah supaya unit Pemerintahan tidak terlalu meremehkan tugas yang sudah ditetapkan.
3. Peranan masyarakat juga diperlukan disini untuk menangani sedikit permasalahan penanggulangan abrasi tersebut agar tidak terjadinya masalah yang membahayakan keselamatan masyarakat sekitaran pinggir pantai.
4. Agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti lebih menguatkan koordinasi antar sector/lembaga/instansi yang memiliki peran yang sama dalam melakukan kegiatan penanggulangan abrasi baik secara alami atau rehabilitas maupun secara buatan seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini bertujuan agar terciptanya pelaksanaan program yang terpadu sehingga tidak terjadi tumpang tindih program pelaksanaan kegiatan.
5. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus memiliki Peraturan Daerah yang mengatur upaya penanggulangan abrasi di pesisir pantai. Hal ini agar lembaga terkait seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan, dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan Dinas Pekerjaan Umum memiliki pedoman dan aturan yang jelas dan lebih fokus.

6. Dari upaya yang sudah berhasil dilakukan agar lebih ditingkatkan lagi seperti penyebarluasan pelaksanaan kegiatan di kawasan lain agar manfaat program penanggulangan abrasi oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bisa dirasakan oleh masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

### 1.7 Jadwal Waktu Kegiatan

Penelitian ini dimulai dari bulan agustus 2020 direncanakan memakan waktu kurang lebih lima bulan dan akan selesai pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya jadwal waktu kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel3.1 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Koordinasi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Abrasi Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

No	Jenis kegiatan	Bulan dan minggu Tahun 2020-2021															
		Agustus-september				September-oktober				November-Desember				Januari-Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	X	X	X													
2	Seminar UP																
3	Riset																
4	Penelitian lapangan																
5	Pengolahan dan analisis data																
6	Konsultasi bimbingan skripsi																
7	Ujian skripsi																
8	Revisi dan pengesahan skripsi dan pengadaan penyerahan																
9	Skripsi																

Sumber: Modifikasi Penelitian 2020

## 1.8 Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun rencana sistematika laporan penelitian yang dilakukan pada penelitian diatas sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini sebagai pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang, masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

### BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikannya teori-teori dari berbagai literature yang berkaitan dengan judul usulan penelitian Bab ini juga terdiri dari kerangka piker, rumusan hipotesis, konsep operasional, operasional variable dan teknik pengukuran.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Adalah bagian yang menjelaskan tentang lokasi penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisa data dan uji hipotesis, jadwal kegiatan penelitian, rencana sistematika laporan penelitian.

### BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan kondisi secara umum lokasi penelitian.

### BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan uraian tentang hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan.

## BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang mengambil beberapa kesimpulan dan mencoba member sarana-sarana sebagai sumbangan dari pemecahan masalah yang dihadapi



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Awang, Dkk. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Amansyah, Zulkifli. 2005, *manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gie Liang The. 1968, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Gunung Agung, Jakarta.
- Handayaniingrat soewarno. 1985, *Pengantar studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: CV Haji Masagung.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Herujito, Yayat M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. PT Grasindo . Jakarta.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta : Erlangga.
- Inu, Syafiie Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Ismail, Solihin. 2009. *Pengantar Manajemen*, Erlangga Jakarta.
- Kuper Jesica & Kuper Adam. (2000). *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Rajawali Press
- Kadarman. 2001. *Sistem pengawasan Management*. Pustaka Quantum. Jakarta

- Keban, Yeremias T. (2007). *Pembangunan Birokrasi di Indonesia: Agenda Kenegaraan yang Terabaikan, Pidato Pengukuran Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta.
- Labolo Muhammad. 2006. *Memahami Ilmu-Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGra indo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 2006. *Konsep Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Dimensi-dimensi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Teori Budaya Organisasi*, Cetakan Pertama. PT Rineka Cipta, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2 Rineka Cipta Jakarta.
- S.P, Siagian.(2003). *Teori dan Praktek Kepemimpinan (cetakan Kelima)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sedarmayanti. 2004. *Good Government (Pemerintahan yang Baik)*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (PWS Dua Belas LangkahStrategis)*. Tangerang: CV. Media Brilian.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama Bandung.
- Syaffie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

T.H, Handoko. 2003. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: BPF.

**Jurnal:**

Ardhoyo, T. E. (2013). Peran dan Strategi Humas ( *Public Relations*) dalam Mempromosikan Produk Perusahaan Jurnal Ilmiah Widya, *1* , 15-21.

Hidayat, Rahmad. (2014). Upaya Pemerintahan Kabupaten Bengkalis Dalam Penanggulangan Abrasi. *Jurnal Penanggulangan Abrasi*. Volume 1.

Istijono, Bambang. (2013). Tinjauan Lingkungan Dan Penanggulangan Abrasi Pantai Padang – Sumatera Barat. *Jurnal Rekayasa Sipil*. Volume 9.

Januarti, Helni. Partisipasi Masyarakat Dalam Menanggulangi Abrasi Pantai Mapadegat Di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Padang: (STKIP) PGRI Sumatera Barat.